



RENCANA STRATEGIS

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA GORONTALO

TAHUN 2020 - 2024 (REVIEW)



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA GORONTALO



RENCANA STRATEGIS

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA GORONTALO

TAHUN 2020 - 2024 (REVIEW)



BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengukuran dan standardisasi Indikator Kinerja Utama Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1522);
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR

KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT
STATISTIK TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



MARGO YUWONO

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo

Tahun 2020 – 2024

ISSN/ISBN : -
No. Publikasi : 75710.2007
Katalog BPS : 1201005.7571

Ukuran Buku : B5 (18,2 cm x 25,7 cm)
Jumlah Halaman : xiii+95

Naskah:
Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo

Desain Kover oleh:
Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo

Penerbit:
© Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo

Pencetak:
-

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo Tahun 2020-2024 (Review) mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 dengan dasar Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2022. Renstra BPS Kota Gorontalo memuat gambaran umum visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan statistik, serta program dan kegiatan BPS, khususnya BPS Kota Gorontalo.

Renstra BPS Kota Gorontalo (Review) ini menjadi pedoman panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS sampai dengan tahun 2024, yang harus dilaksanakan oleh semua jajaran BPS Kota Gorontalo. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pembangunan statistik dan mewujudkan pencapaian Visi BPS sebagai **Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju**, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun.

Bagi semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra BPS Kota Gorontalo Tahun 2020-2024 (Review) ini disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN).

Gorontalo, 10 Januari 2022

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Gorontalo



Ir. Rasjid Masjhur

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga pemerintah non-Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPS memiliki kantor perwakilan tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, salah satunya BPS Kota Gorontalo sebagai perwakilan di tingkat kabupaten/kota.

Sesuai dengan Undang-undang No. 16 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999, BPS memiliki peran sebagai berikut:

- Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat.
- Membantu kegiatan statistik di institusi pemerintah dan lembaga lainnya dalam mengembangkan sistem perstatistikan nasional.
- Mengembangkan dan mempromosikan teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
- Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan Negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

Sejalan dengan Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025 yaitu : “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, serta visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka BPS berupaya untuk meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik.

Cerminan dari upaya BPS tersebut dengan menetapkan Visi BPS Tahun 2020-2024 yaitu “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”.

Sedangkan misi BPS Tahun 2020-2024 dirumuskan dalam 4 pernyataan misi, yakni:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis di tahun 2024, yaitu: Tujuan 1 : Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan Misi ke-1 : Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional; Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan : Misi ke-2 : Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan; Tujuan 3 : Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan : Misi ke-3 : Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan Tujuan 4 : Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan : Misi ke-4 : Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS pada setiap perspektif yang akan dicapai oleh BPS pada periode 2020-2024, antara lain: (1) Perspektif Stakeholder, (2)

Perspektif Stakeholder, (3) Perspektif *Internal Process*, (4) Perspektif *Learning and Growth*.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis diwadahi dalam sejumlah program, yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); dan (2) Program Dukungan Manajemen (Dukman) Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam Renstra BPS 2020-2024 tersebut akan menjadi pedoman bagi BPS untuk mewujudkan visinya sebagai Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum	4
1.2. Potensi dan Permasalahan	17
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BADAN PUSAT STATISTIK.....	21
2.1. Visi	23
2.2. Misi	23
2.3. Tujuan	27
2.4. Sasaran Strategis	31
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	41
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	41
3.2. Arah dan Kebijakan Strategi BPS Kota Gorontalo	41
3.3. Kerangka Regulasi	63
3.3. Kerangka Kelembagaan	65
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	73
4.1. Target Kinerja BPS Kota Gorontalo	73
4.2. Kerangka Pendanaan BPS Kota Gorontalo	77
BAB V PENUTUP	82
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jenis Data Yang Paling Banyak Dicari di PST BPS Kota Gorontalo.....	7
Gambar 2. Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Data BPS Kota Gorontalo.....	8
Gambar 3 Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Pelayanan PST BPS Kota Gorontalo	9
Gambar 4. Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, dan Gap Pelayanan BPS Kota Gorontalo	10
Gambar 5. Lima Publikasi DDA 2014 Terbaik	15
Gambar 6. <i>Interlink</i> antara sistem dalam rangka peningkatan pelayanan statistik	43
Gambar 7. Roadmap Transformasi Statistik Tahun 2018-2021	66
Gambar 8. Roadmap Transformasi TI Tahun 2018-2021	67
Gambar 9. Roadmap Transformasi SDM dan Organisasi Tahun 2018-2021.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Kepuasan, Tingkat Kepentingan, dan Gap per Atribut Pelayanan di PST BPS Kota Gorontalo.....	10
Tabel 2. Rata-rata Capaian Kinerja BPS Kota Gorontalo Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 (%)	11
Tabel 3. Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS 2020-2024	28
Tabel 4. Kerangka Regulasi	61
Tabel 5. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja BPS Kota Gorontalo Tahun 2020 - 2024.....	71
Tabel 6. Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPS Kota Gorontalo BPS Kota Gorontalo Tahun 2020 - 2024.....	74

DAGTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Kepuasan, Tingkat Kepentingan, dan Gap per Atribut Pelayanan di PST BPS Kota Gorontalo	10
Tabel 2. Rata-rata Capaian Kinerja BPS Kota Gorontalo Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 (%)	11
Tabel 3. Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS 2020-2024	28
Tabel 4. Kerangka Regulasi	61
Tabel 5. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja BPS Kota Gorontalo Tahun 2020 - 2024	71
Tabel 6. Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPS Kota Gorontalo BPS Kota Gorontalo Tahun 2020 - 2024	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.2. Potensi dan Permasalahan

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan titik awal untuk menentukan arah strategis kebijakan melalui penetapan program, kegiatan, serta pendanaan yang tepat. Data dan informasi yang memuat rencana strategis yang jelas, relevan, dan terukur akan menjadi acuan yang berguna bagi semua pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, monitoring, dan evaluasi program dalam rangka mencapai rencana yang efektif dan efisien.

Badan Pusat Statistik (BPS) diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data statistik yang berkualitas, lengkap, akurat, relevan, mutakhir, dan berkesinambungan sebagai acuan dasar dalam perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik telah menyusun perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan dalam lima tahun ke depan melalui Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020.

Penyusunan Rencana Strategis (BPS) berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang

PENDAHULUAN

didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sedangkan visi pembangunan dalam RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur yang ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing tinggi.

Muatan Renstra BPS yang disusun meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BPS dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPS dalam penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Substansi pada Renstra BPS 2020-2024 harus disesuaikan dengan RPJMN 2020-2024, termasuk sasaran pokok RPJMN 2020-2024 yang terintegrasi menjadi sasaran Renstra BPS. Oleh karena itu, sasaran dan target pembangunan pada Renstra BPS telah mempertimbangkan hasil evaluasi Renstra 2015-2019.

BPS Kota Gorontalo sebagai perwakilan BPS RI di daerah juga perlu menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 guna mendukung terlaksananya program dan kegiatan BPS, baik BPS Republik Indonesia maupun BPS Provinsi Gorontalo. Penyusunan Renstra BPS Kota Gorontalo juga berpedoman pada Peraturan Kepala BPS Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.

1.1. Kondisi Umum

Dalam Renstra BPS Tahun 2015 – 2019 yang juga menjadi visi BPS Kota Gorontalo, visi yang ditetapkan adalah “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 3 (tiga) pernyataan misi, yakni: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; (2) memperkuat Sistem Statistik Nasional yang

berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS beraspirasi untuk mencapai tujuan strategis pada tahun 2019, yaitu:

1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas;
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik;
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik; dan
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2015–2019, yakni bahwa BPS berupaya terus-menerus untuk meningkatkan: (1) kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik); (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunaanya; (3) efektifitas dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik; dan (4) kualitas dari proses tata kelola (*governance*) di dalam organisasinya. Keseluruhan tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 9 (sembilan) sasaran strategis, yang masing-masing memiliki target indikator untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra BPS Kota Gorontalo Tahun 2015 – 2019, diwadahi dalam sejumlah program, yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); dan (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA).

PENDAHULUAN

1.1.1. Pencapaian Umum Visi BPS Tahun 2015 – 2019

Pencapaian umum visi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua, hingga tahun 2019, yang juga menjadi visi BPS Kota Gorontalo, dapat dilihat dari Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data (SKD) 2019. Survei ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan kepuasan konsumen guna meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Responden SKD 2019 adalah konsumen yang pernah menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS baik yang datang langsung ke PST maupun yang tanpa tatap muka seperti melalui telepon, surat, layanan *online*, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil survei tersebut, diketahui bahwa ragam data yang paling banyak dicari konsumen BPS Kota Gorontalo adalah data sosial, seperti data kependudukan dan data angkatan kerja. Sedangkan jika dilihat dari sumber datanya, untuk data mikro yang paling banyak diperoleh dari penyedia data BPS Kota Gorontalo adalah Data Mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan untuk sumber data yang dalam bentuk publikasi adalah Kota Gorontalo Dalam Angka (Gambar 1).



Gambar 1. Jenis Data Yang Paling Banyak Dicari di PST BPS Kota Gorontalo

Dari sisi kualitas data BPS Kota Gorontalo, hasil SKD 2019 menunjukkan bahwa sebesar 99,49 persen konsumen merasa puas dengan data yang disediakan oleh BPS Kota Gorontalo (Gambar 2), terutama untuk aspek kemutakhiran data yang disajikan.



Gambar 2. Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Data BPS Kota Gorontalo

Dari sisi pelayanan data BPS Kota Gorontalo, persentase konsumen yang puas dengan pelayanan PST BPS Kota Gorontalo mencapai 99,49 persen, terutama atas sikap petugas PST saat memberikan pelayanan. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS sebesar 100 persen. Dan dari sisi pemenuhan sarana dan prasarana, ada 98,48 persen konsumen yang merasa puas dengan pemenuhan sarana prasarana BPS (Gambar 3). Sedangkan untuk seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Kota Gorontalo ditunjukkan dengan angka Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) yang sebesar 90,35. IKK memperhitungkan

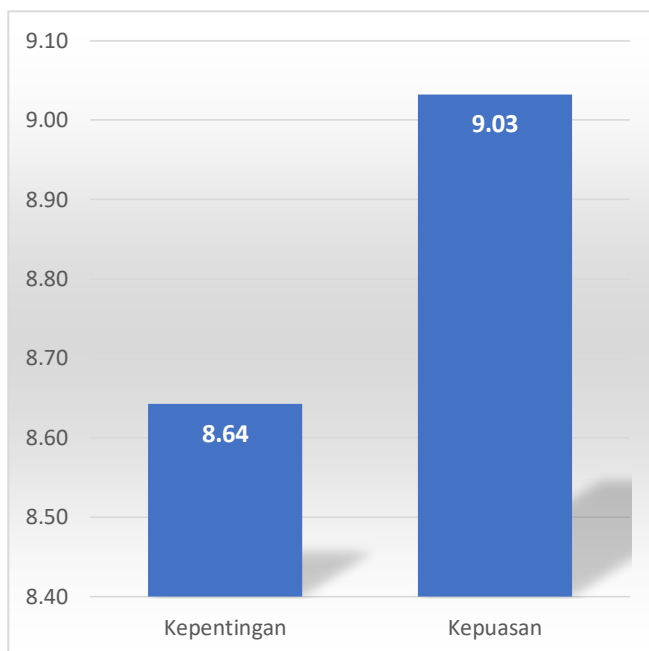
antara tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan yang dirinci dalam 12 (dua belas) atribut pelayanan.



Gambar 3 Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Pelayanan PST BPS Kota Gorontalo

Jika melihat hasil *Gap Analysis* antara harapan konsumen dengan kinerja pelayanan PST di BPS Pusat, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan BPS Kota Gorontalo sudah memuaskan konsumen (Gambar 4).

PENDAHULUAN



Gambar 4. Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, dan Gap Pelayanan BPS Kota Gorontalo

Tabel 1. Tingkat Kepuasan, Tingkat Kepentingan, dan Gap per Atribut Pelayanan di PST BPS Kota Gorontalo

No.	Rincian Pelayanan	Tingkat Kepuasan	Tingkat Kepentingan	Gap
1	Kejelasan informasi dan alur prosedur pelayanan	8.97	8.52	0.45
2	Persyaratan pelayanan mudah dipahami dan dipenuhi	9.09	8.76	0.33
3	Sikap Petugas saat memberikan layanan	9.27	9.06	0.21
4	Kemampuan petugas saat memberikan informasi	9.21	8.73	0.48
5	Waktu pelayanan sesuai jadwal yang ditetapkan	8.97	8.64	0.33
6	Pelayanan selesai sesuai target penyelesaian	9.09	8.73	0.36
7	Informasi biaya/tarif produk BPS jelas	9.00	8.55	0.45
8	Kenyamanan sarana dan prasana	8.88	8.61	0.27
9	Kemudahan memperoleh publikasi dari PST/Perpusatakaan BPS	8.94	8.61	0.33
10	Kemudahan memperoleh data dari website BPS	9.03	8.58	0.45
11	Kemudahan akses metadata	9.09	8.47	0.62
12	Kejelasan fasilitas pengaduan	8.85	8.45	0.4

1.1.2. Capaian Kinerja BPS Kota Gorontalo Tahun 2015-2019

Capaian kinerja BPS Tahun 2015-2019 merupakan pencapaian dari indikator-indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis selama periode Renstra BPS 2015-2019. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing tujuan maupun sasaran. Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan targetnya pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada tahun yang bersangkutan. Hasil capaian kinerja BPS Tahun 2015 – 2019 tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2. Rata-rata Capaian Kinerja BPS Kota Gorontalo Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 (%)

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
T1	Peningkatan kualitas data statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	98,35	120,00	117,65	113,80	111,11
SS1	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	98,35	120,00	117,65	113,80	111,11

PENDAHULUAN

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
		Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	120,00	110,71	102,00	95,78	98,75
		Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	85,71
		Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei	113,61	99,92	98,93	102,00	99,50
T2	Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	120,00	117,61	113,29	115,30	110,54
SS2	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

PENDAHULUAN

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
		Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	-	-	120,00	120,00	120,00
		Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	120,00	113,10	112,12	120,00	111,11
T3	Penguatan sistem statistik nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	-	-	100,00	114,20	100,00
SS3	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	-	-	100,00	100,00	100,00
T4	Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	120,00	93,66	87,23	85,15	98,14

PENDAHULUAN

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
SS4.1	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	120,00	93,66	87,23	85,15	98,14
SS4.2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	120,00	116,08	110,59	103,50	109,42
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	-	-	100,00	100,00	100,00

Sumber: Laporan Kinerja BPS Kota Gorontalo 2015-2019 (diolah)

Perkembangan capaian kinerja sasaran cenderung bergerak secara fluktuatif dari tahun ke tahun. Dari tahun 2015-2019 memiliki capaian tertinggi dengan nilai 120,00 persen. Indikator yang senantiasa mendapatkan capaian 120,00 persen secara konsisten dari tahun 2015-2019 adalah jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS. Sementara itu, nilai capaian terendah selama periode 2015-2019 terdapat pada tahun 2018 yaitu pada indikator hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat, sebesar 85,15 persen.

Dari keempat tujuan, terlihat bahwa tujuan hampir seluruh tujuan di setiap tahun sudah memiliki capaian kinerja di atas 100 persen. Namun

demikian, untuk tujuan empat, dari tahun 2016-2019 masih memiliki nilai capaian kinerja kurang dari 100,00 persen.

Jika dibandingkan dengan periode tahun-tahun sebelumnya, terdapat beberapa perubahan khususnya pada indikator yang digunakan. Perubahan tersebut merujuk kepada Peraturan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik, dan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

1.1.3. Prestasi BPS Kota Gorontalo Tahun 2015-2019

Berbagai prestasi berhasil diukir atas kinerja BPS sejak tahun 2015-2019. Apresiasi tersebut diberikan oleh berbagai kementerian dan lembaga atas kinerja BPS yang dianggap baik. Seiring berjalan tahun, prestasi yang BPS raih semakin baik dan menunjukkan peningkatan.

Prestasi tahun 2015:

- Prestasi yang telah dicapai BPS Kota Gorontalo pada tahun 2015 adalah menjadi terbaik ketiga dalam hal Publikasi Daerah Dalam Angka 2014 yang penilaiannya dilakukan pada tahun 2015.



Gambar 5. Lima Publikasi DDA
2014 Terbaik

PENDAHULUAN

Prestasi tahun 2018:

1. Peringkat Pertama Satuan Kerja Paling Tepat Waktu dalam Pelaporan Capaian Kinerja Triwulan I 2018. Berdasarkan penilaian BPS Provinsi Kota Gorontalo, pada tahun 2018 BPS Kota Gorontalo menjadi satker tercepat dalam melakukan pelaporan Capaian Kinerja pada periode Triwulan I 2018 (Januari s.d. Maret).
2. Peringkat Ketiga Satuan Kerja Paling Tepat Waktu dalam Pelaporan Capaian Kinerja Triwulan II 2018. Berdasarkan penilaian BPS Provinsi Kota Gorontalo, pada tahun 2018 BPS Kota Gorontalo menjadi satker tercepat dalam melakukan pelaporan Capaian Kinerja pada periode Triwulan II 2018 (April s.d. Juni).
3. Juara Umum Se-Provinsi Gorontalo pada peringatan (HSN) Hari Statistik Nasional Tahun 2018 di Provinsi Gorontalo.

Prestasi tahun 2019:

1. Penghargaan dari Pemerintah Kota Gorontalo atas Kerjasama yang Baik dalam pengumpulan Data Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2019.
2. Penghargaan dari Bappeda Kota Gorontalo atas Koordinasi dan Penyiapan Data Tepat Waktu Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019.

1.1.4. Capaian Program dan Kegiatan BPS 2015-2019

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL)
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA)
3. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

Payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik diatur dalam Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar. BPS juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Secara kelembagaan, BPS Kota Gorontalo merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia yang dinyatakan sebagai instansi vertikal melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional, baik di pusat maupun daerah. BPS menjadi Badan yang bertanggungjawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik

PENDAHULUAN

Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Kondisi eksternal menunjukkan bahwa BPS Kota Gorontalo telah mendapat dukungan kuat dari Pemerintah Daerah di mana data dan informasi statistik telah menjadi rujukan penting dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan di daerah ini.

Kondisi internal telah menunjukkan tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai dan terus ditingkatkan, adanya semangat dan dedikasi yang tinggi di lingkungan pegawai serta terciptanya suasana kebersamaan dalam lembaga, serta adanya upaya menumbuhkembangkan nilai-nilai inti BPS, yakni: profesional, integritas dan amanah.

1.2.2. Permasalahan

Peningkatan kebutuhan pengguna terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), lebih berkualitas (*better*) dan lebih murah (*cheaper*). Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Saat ini, belum terbentuk suatu strategi komunikasi Strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data sangat dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik yang lebih berkualitas.

Permasalahan yang akan dihadapi dalam periode 2015-2019 mencakup permasalahan internal maupun permasalahan eksternal. Kondisi eksternal menunjukkan masih tingginya Respondent burden

atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS merupakan suatu permasalahan yang perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik. BPS dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri agar informasi yang disampaikan responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui.

Belum dapat terpenuhinya kebutuhan data dan informasi statistik hingga wilayah terkecil (small area statistic) termasuk data mikro dan permintaan akan data individu. Terkait dengan permintaan data individu, BPS dibatasi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu.

Adanya pemekaran daerah dan desentralisasi membutuhkan ketersediaan berbagai jenis data dan informasi statistik untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi di setiap daerah. Hingga saat ini, penyediaan berbagai jenis dan keragaman data dan informasi statistik yang dibutuhkan di daerah masih belum dapat dipenuhi.

Kondisi internal masih menunjukkan permasalahan lama, yaitu masih terbatasnya sumber daya manusia khususnya di BPS Kota

PENDAHULUAN

Gorontalo dibandingkan dengan jumlah survei dan jumlah alokasi sampel yang terdistribusi untuk wilayah Kota Gorontalo, sehingga beban kerja SDM yang ada menjadi cukup tinggi. Dampak dari beban kerja yang tinggi ini menyebabkan hasil yang diperoleh tidak optimal karena keterbatasan waktu pelaksanaan dimana beberapa jadwal kegiatan yang ditetapkan waktunya bersamaan. Selain itu, masih minimnya SDM ahli dalam pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan laporan pengelolaan keuangan terutama di BPS Kabupaten/Kota yang tidak kalah pentingnya dengan kinerja kegiatan teknis BPS. Ditambah lagi belum terciptanya perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan pemetaan kompetensi. Kebutuhan SDM di BPS saat ini masih dilakukan dengan memperhatikan posisi lowong (*vacant*) pada struktur organisasi. Permasalahan lain dalam rumpun SDM adalah BPS masih belum memiliki sistem perencanaan karir, analisis jabatan, sistem mutasi, dan standar kompetensi yang dapat menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia.

Ketepatan waktu rilis (*timeliness*) yang masih belum optimal merupakan permasalahan lain yang teridentifikasi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang sering terkendala, sebagai akibat adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi konten. Kekurangtepatan waktu rilis juga dikarenakan koordinasi antar pusat-pusat dan pusat-daerah yang masih lemah, yang mana hal ini terjadi karena kurang terintegrasinya komunikasi antara pusat dan daerah.



BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. Visi BPS Kota Gorontalo

2.2. Misi BPS Kota Gorontalo

2.3. Tujuan BPS Kota Gorontalo

2.4. Sasaran Strategis BPS Kota Gorontalo

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN BADAN PUSAT STATISTIK

2.1 Visi

Visi BPS Kota Gorontalo merupakan visi BPS tahun 2020-2024 yang ditetapkan sebagai berikut:

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”

(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)

Dalam visi yang baru tersebut, BPS Kota Gorontalo yang merupakan bagian dari BPS RI berperan dalam penyediaan data statistik dasar yang berkualitas untuk Pemerintah Kota Gorontalo dan mempunyai kebenaran akurat serta menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena BPS memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.

2.2 Misi

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang Ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang Ke-3 Pembangunan yang

Merata dan Berkeadilan. Berdasarkan hal-hal diatas maka misi BPS 2020-2024 yang juga menjadi misi BPS Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Misi BPS 2020-2024 mengandung arti sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional

Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007). Kualitas suatu output statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas (Statistik Korea, n.d.:10; Helfert & Foley, 2009:187). Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS meliputi *relevance* (relevansi), *accuracy* (akurasi), *timeliness* (aktualitas) & *punctuality* (tepat waktu), *accessibility* (aksesibilitas), *coherence* (koherensi) & *comparability*

(keterbandingan), *interpretability* (interpretabilitas)... dan berstandar internasional...

“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*”.

2. Membina K/L/D/I Melalui Sistem Statistik Nasional yang Berkesinambungan

Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan (UU No. 16 Tahun 1997). BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data

Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik bertindak sebagai pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional

Dalam mewujudkan pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur

4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.

SDM statistik yang unggul dan adaptif tercermin pada Insan statistik yang profesionalisme, berintegritas, dan amanah

... profesionalisme...

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.

.... integritas ...

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

....amanah...

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

2.3 Tujuan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita

bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini.

Tabel 3. Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS 2020-2024

VISI BPS 2020-2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	MISI BPS 2020-2024
		1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
		2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
		3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
		4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah
TUJUAN	1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	
	2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	
	3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	
	4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	

Masing-masing tujuan memiliki keterkaitan dengan pernyataan misi BPS dalam rangka mewujudkan Visi BPS 2020-2024. Tujuan pertama yaitu “menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan”, berkaitan dengan misi BPS yang pertama yaitu “Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional”. Tujuan “Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan Misi ke-2 yaitu “Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan”. Tujuan “Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN” berkaitan dengan misi ke-3 yaitu “Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional” dan Tujuan ke-4 yaitu “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi”, terkait dengan misi ke-4 “membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah”.

Tujuan pertama, pembangunan statistik menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik dalam rangka menyediakan data statistik yang akan digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap-CERDAS (*Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia*) dalam kerangka penjaminan kualitas.

Tujuan kedua, meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN, di dalam tujuan tersebut memuat misi BPS

untuk meningkatkan peran BPS: sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN, sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak. Di dalam tujuan kedua ini pula, peran BPS sebagai pembina data dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia semakin terlihat.

Tujuan ketiga, meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap- CERDAS yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sistem informasi manajemen statistik.

Tujuan keempat, Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap-CERDAS yaitu Pengembangan sumber daya manusia.

2.4 Sasaran Strategis BPS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program BPS. Program BPS termasuk BPS Kota Gorontalo terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan internal).

Renstra BPS Tahun 2020 – 2024 disusun dengan mengikuti arahan Presiden dengan mengikuti *money follow program*, artinya seluruh Program KL harus mengikuti arahan visi misi yang ditetapkan Presiden, sehingga program-program antar KL dapat disinergikan. Oleh karena itu, dalam Renstra BPS 2020-2024 termasuk restrukturisasi program sesuai dengan arahan presiden tersebut yang ditujukan untuk menunjukkan nomenklatur program yang dapat menggambarkan *outcome* dalam pencapaian sasaran pembangunan baik pencapaian yang dilakukan oleh satu Kementerian/Lembaga, maupun antar Kementerian/Lembaga (Lintas K/L), sesuai dengan kesepakatan dalam TM restrukturisasi program BPS terdiri dari:

- (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan
- (2) Program Dukungan Manajemen.

Dalam penyusunannya, BPS menjabarkan 4 (empat) misi dan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke

dalam 4 perspektif, yaitu perspektif stakeholders, perspektif customers, perspektif *internal process*, dan perspektif *learning and growth*.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, BPS telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPS. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS pada setiap perspektif yang akan dicapai oleh BPS pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Perspektif Stakeholder

Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan statistik, yang diindikasikan dengan:

- a) Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta, dengan indikator:
 - 1) Meningkatnya harmonisasi kegiatan survei;
 - 2) Berkurangnya tumpang tindih kegiatan survei.
- b) Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna data, dengan indikator:
 - 1) Meningkatnya komunikasi dengan responden;
 - 2) Meningkatnya perbaikan metode pengumpulan data;
 - 3) Sosialisasi kepada masyarakat;
 - 4) Memperkuat aturan untuk menjangkau aktivitas bisnis yang berbasis teknologi informasi;

- 5) Meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM;
 - 6) Membuat customer relationship management;
 - 7) Menyusun data mining pengguna data;
 - 8) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data;
 - 9) Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik;
 - 10) Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan responden.
- c) Meningkatkan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik, dengan indikator:
- 1) Persentase pengunjung BPS yang puas dengan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;
 - 2) Persentase pegawai BPS yang puas dengan sarana dan prasarana kerja termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
 - 3) Persentase tersedianya sarana dan prasarana layanan statistik sesuai standar;
 - 4) Jumlah satker yang menerapkan smart office termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
 - 5) Dokumen grand design smart office termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.

d) Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi internasional di Indonesia, dengan indikator:

- 1) Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei;
- 2) Jumlah technical assistance yang dilakukan BPS di NSO;
- 3) Jumlah MoU atau kerjasama BPS dengan internasional;
- 4) Jumlah NSO yang menerima statistical capacity building di BPS;
- 5) Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei.

e) Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standard penjaminan kualitas, dengan indikator:

- 1) Persentase kegiatan statistik yang telah menerapkan standar penjaminan kualitas;
- 2) indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas.

2. Perspektif *Customer*

SS.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah: Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas.

Dengan indikator sasaran:

- a. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional;

- b. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional.

SS.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan statistik sektoral K/L/D/I.

Dengan indikator sasaran: Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri.

3. Perspektif *Internal Process*

SS.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN.

Dengan indikator sasaran:

- a. Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik;
- b. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar.

4. Perspektif *Learning and Growth*

SS.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah: SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

Dengan indikator sasaran:

- a. Opini BPK atas laporan keuangan BPS;
- b. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS.

Nilai-Nilai Inti ASN

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang *Implementasi Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara, dimana mengatur bahwa keseragaman nilai-nilai dasar ASN yaitu berAKHLAK dan *Employer Branding* ASN adalah Bangsa Melayani Bangsa, dengan ditetapkannya berAKHLAK sebagai Core Values untuk seluruh ASN, maka *Core Values* BPS sebelumnya yaitu Profesional, Integritas dan Amanah (PIA) diganti menjadi berAKHLAK. Core Values berAKHLAK dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mneutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan, serta menghadapi perubahan;
7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

Dari setiap nilai dasar diatas terdapat paduan perilaku (kode etik) yang dapat dipedomani untuk diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari. Penjelasan perilaku dari nilai dasar berAKHLAK adalah sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan
 - a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
 - c. Melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap insan statistik dalam melaksanakan pekerjaan dan pengabdian kepada profesi dan organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
 - c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. Kompeten
 - a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. Membantu orang lain belajar;
 - c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. Harmonis
 - a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;

- b. Suka menolong orang lain;
 - c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif
- 5. Loyal
 - a. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - b. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan Negara;
 - c. Menjaga rahasia jabatan dan negara.
- 6. Adaptif
 - a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 - c. Bertindak proaktif.
- 7. Kolaboratif
 - a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPS

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPS
Kota Gorontalo

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 merupakan titik tolak dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama diterjemahkan dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 sebagai Visi Presiden dan Wakil Presiden:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong-Royong”

Pada tahun 2021, pemerintah kembali menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019, serta kebijakan pembangunan Tahun 2020. Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2021 memiliki tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Untuk mendukung terwujudnya tema dan sasaran pembangunan Tahun 2021, maka ditentukanlah arah kebijakan guna mewujudkan sasaran tersebut. Strategi pembangunan yang dirumuskan untuk mendukung arah kebijakan pembangunan, dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Prioritas Nasional tersebut adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);
 - b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
 - d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan;
 - e. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM) dan koperasi;
 - f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
 - g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN);
 - h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - a. Pembangunan wilayah Sumatera;
 - b. Pembangunan wilayah Jawa-Bali;
 - c. Pembangunan wilayah Nusa Tenggara;
 - d. Pembangunan wilayah Kalimantan;
 - e. Pembangunan wilayah Sulawesi;
 - f. Pembangunan wilayah Maluku;
 - g. Pembangunan wilayah Papua.

3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan;
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Memperkuat moderasi beragama;
 - d. Peningkatan budaya literasi inovasi dan kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - a. Infrastruktur pelayanan dasar;
 - b. Infrastruktur ekonomi;
 - c. Infrastruktur perkotaan;
 - d. Energi dan ketenagalistrikan;
 - e. Transformasi digital.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;

- b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
 - c. Pembangunan rendah karbon.
7. Meningkatkan stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
- a. Konsolidasi demokrasi;
 - b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
 - c. Penegakan hukum nasional;
 - d. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
 - e. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Prioritas Nasional RKP 2021 yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi BPS:

1. *Passenger Exit Survey* (PES), Penyusunan TSA, Pendataan Wisatawan Nusantara, Pendataan Statistik E-Commerce, Survei Produktivitas Tanaman Pangan/Ubinan, Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA), dan Persiapan Sensus Pertanian 2023. Ketujuh kegiatan tersebut mendukung Prioritas Nasional 1 (PN1) yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Program prioritas yang terkait adalah penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Kegiatan prioritas yang dicanangkan adalah peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Proyek prioritas yang berkaitan adalah pengembangan Statistik Pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan Statistik *E-Commerce*

dan pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan Statistik Pangan.

2. *Metropolitan Statistical Area (MSA)*. Kegiatan ini mendukung Prioritas Nasional kedua (PN2) yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Program prioritas yang terkait yaitu Pembangunan Wilayah Sumatera/Pembangunan Wilayah Kalimantan dengan kegiatan prioritas yaitu pembangunan kawasan perkotaan. Proyek prioritas yang dicanangkan yaitu pengembangan wilayah metropolitan Palembang (Petungraya Agung)/Pengembangan wilayah metropolitan Banjarmasin (Banjarbakula).
3. Sensus Penduduk 2020 Lanjutan. Kegiatan ini mendukung Prioritas Nasional ketiga (PN3) yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Program prioritas yang terkait yaitu Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan, dengan kegiatan prioritas yaitu Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan. Proyek Prioritas yang dicanangkan adalah pengembangan data dan informasi kependudukan (statistik hayati) yang akurat, lengkap dan tepat waktu.

3.2. Arah dan Kebijakan Strategi BPS Kota Gorontalo

Mengacu kepada RPJMN 2020-2024, BPS menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2020-2024. Arah kebijakan terkait penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas pada tahun

2020-2024 yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional mencakup:

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta;

Arah kebijakan yang dapat mendukung pencapaian tersebut yaitu terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Strategi yang dilakukan:

- a. Meningkatkan harmonisasi kegiatan survei; dan
- b. Mengurangi tumpang tindih kegiatan survei.

2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data;

Arah dan kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a. Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN;
- b. Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional; dan
- c. Pembinaan K/L/D/I dalam rangka penyediaan statistik sektoral.

Strategi yang dilakukan:

- a. Meningkatkan komunikasi dengan responden;
- b. Memperbaiki metode pengumpulan data;
- c. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang statistik;
- d. Membuat customer relationship management;
- e. Menyusun data mining pengguna data;
- f. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data; dan
- g. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik

3. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM;

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
- b. Dan Penguatan Kompetensi Pegawai BPS.

Strategi yang dilakukan:

- a. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS melalui penyelenggaraan capacity building berdasar *Training Need Analysis (TNA)*, pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai; dan
 - b. Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional
4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima; dan
- b. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.

Strategi yang dilakukan:

- a. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;
- b. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
- c. Menyusun standar sarana dan prasarana layanan statistik;
- d. Meningkatkan penerapan smart office pada satker berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; dan

- e. Menyusun dokumen grand design smart office berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.
5. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia;

Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia. Strategi yang dilakukan:

- a. Meningkatkan penerapan standar penjaminan kualitas dalam kegiatan statistik; dan
 - b. Menyusun indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas.
6. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas.

Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu dengan melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral. Adapun penjaminan kualitas BPS mengacu pada rekomendasi UNSD (*United Nation Statistics Devision*) yang menurunkan 19 prinsip kualitas (*principal quality*) berdasarkan 10 UN *Fundamental Principle of Official Statistics*. Strategi yang dilakukan:

- a. Menyusun quality gates dan melaksanakan penjaminan kualitas pada setiap proses bisnis statistik;
- b. Melakukan pengukuran kualitas dan deklarasi kualitas pada output yang dihasilkan.

BPS mengelompokkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai 6 arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas

sebagaimana tetuang dalam RPJMN tersebut menjadi 3 bidang utama prioritas, yaitu:

3.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam semakin hari semakin meningkat. Karena hal tersebut, pembangunan Statistik dalam kurun waktu 2020-2024 masih diarahkan untuk terwujudnya data statistik yang berkualitas karena pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang akurat, mutakhir dan mudah diakses. Selain itu, dibutuhkan juga proses kerja yang sistematis dengan didukung SDM yang professional serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern.

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. Indikator ini menunjukkan komitmen BPS dalam penerapan standar kualitas data dalam setiap publikasi yang dihasilkan.

3.2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan SDM di BPS

Salah satu Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing karena manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata. Sebagai modal utama, SDM Indonesia harus sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, begitu pula untuk SDM yang ada di lingkungan BPS.

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi di bidang ini diukur dengan indikator kinerja persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sectoral secara mandiri sesuai NSPK, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembinaan statistik sectoral. Selain itu menjadi tolak ukur utama adalah BPS mampu menjadi *strategic enabler* dan *decision support sistem (DSS)*.

3.2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di BPS

Pembangunan infrastruktur sebagai upaya mencapai target RPJMN 2020-2024 adalah dorongan dalam pemerataan pelayanan dasar di Indonesia. Dalam kedepannya peningkatan ini tidak lepas dari sistem yang dibangun berdasarkan kebutuhan. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas yang ditunjukkan pada bagan dibawah ini:



Gambar 6. *Interlink* antara sistem dalam rangka peningkatan pelayanan statistik

Interlink antara sistem ini mengakibatkan perlu adanya *remapping* dan *reengineering* infrastruktur yang dirancang pada tahun 2020-2024. Pada awal-awal tahun, TIK hanya dikenal sebagai *tools/enabler*. Namun seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi, TIK bukan lagi hanya sebagai *tools* atau *enabler*, namun harus difungsikan secara tepat dan menjadi solusi bagi segala kekurangan.

Selain pada produk TIK, sistem yang diharapkan juga bukan hanya berkaca pada keinginan internal, tetapi juga berfokus pada kebutuhan pengguna dan penyedia dalam meningkatkan kualitas data statistik. Jika dulu adalah *Better, Faster, and Cheaper* saat ini haruslah *reliable and accountable*.

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi masing bidang sistem dan infrastruktur diukur dengan indikator persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembangunan sistem dan infrastruktur pelayanan statistik.

Setelah mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi masing-masing bidang tersebut, secara keseluruhan, arah kebijakan dan strategi dari BPS pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung prioritas pembangunan RPJMN, serta pencapaian tujuan BPS adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan

Kondisi yang ingin dicapai adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan

kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan sektoran agar memenuhi standar. Beberapa strategi yang dapat mendukung arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Meningkatnya akurasi data, melalui :
 - i. Integrasi proses bisnis; serta
 - ii. Penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas
- b) Memastikan kemutakhiran data dengan :
 - i. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data;
 - ii. Penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - iii. Penggunaan Big Data untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan.
- c) Melakukan *Risk Management* di setiap kegiatan statistik
- d) Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional
- e) Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE
- f) Menyediakan/membangun sistem rekomendasi kegiatan statistik sektoral
- g) Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral

- h) Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia

2. Meningkatkan kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan arah kebijakan terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Beberapa strategi yang mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut adalah:

- a) Penguatan kapasitas Internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional
- b) Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sectoral
- c) Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres no 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- d) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK

3. Meningkatnya pelayanan Prima dalam penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai adalah penguatan statistik sectoral K/L/D/I, dengan arah kebijakan:

Pertama, pembangunan infrastruktu Statistik Nasional untuk mendukung SSN. Strategi yang mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut yaitu menilai kebutuhan *stakeholder* terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN).

Kedua, penguatan implementasi Sistem Statistik Nasional dengan pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional. Strategi yang mendukung arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Menyediakan akses kepada *stakeholder* terhadap SISN
- b) Membina *stakeholder* dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN

Ketiga, arah kebijakan penyediaan statistik sectoral. Strategi yang mendukung arah kebijakan ini, yaitu:

- a) Melakukan pembinaan statistik sectoral ke seluruh K/L/D/I
- b) Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik.

4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi

Kondisi yang ingin dicapai adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan arah kebijakan:

- a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
- b) Penguatan kompetensi pegawai BPS dengan penerapan pengembangan SDM berdasarkan *Human Capital Development Planning* (HCDP) yang terpadu, penyelenggaraan *capacity building* berdasarkan *Traning Need Analysis* (TNA), dan pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai.

- c) Perbaikan sistem perencanaan karir, mutase dan rotasi yang baik dengan menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai, menyempurnakan peraturan kepegawaian, internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM, modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian, pencapaian karir individu berbasis kinerja, penyediaan jalur karir yang disusun dari *job family*, dan talent pool untuk suksesi organisasi
- d) Penguatan fungsi pembina jabatan fungsional melalui evaluasi tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional
- e) Pemanfaatan operation management sistem untuk meningkatkan kinerja pegawai dengan menyesuaikan standardisasi kualitas SDM dan menyesuaikan standar sarana dan prasarana dengan peraturan yang berlaku
- f) Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja dengan mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.
- g) Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja dengan mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal.
- h) Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran dan

meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

- i) Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai
- j) Penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar dengan strategi meningkatkan fasilitas fisik layanan, meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan, dan peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem.
- k) Pewujudan *smart office* di BPS dengan merumuskan *grand design smart office* dan implementasi *smart office* di BPS

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi yang diuraikan diatas, BPS memiliki dua program yang telah disesuaikan, terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen

Program ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk:

- 1. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;
- 2. Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi

kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;

3. Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah; serta
4. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.
5. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Kegiatan-kegiatan dalam program PPIS dapat terlaksana dengan optimal jika didukung Program Dukungan Manajemen yang didalamnya termasuk sarana prasarana, dan pengawasan/audit internal.

3.2.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, oleh karena itu pembangunan bidang statistik tetap akan menempatkan pengarusutamaan ini dalam kegiatan yang tidak terpisahkan.

Hal ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan bidang statistik tahun 2020-2024 adalah:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 319 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antar pilar pembangunan yang saling berpengaruh. Pilar pembangunan yang dimaksud meliputi pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan serta hukum dan tatakelola yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

BPS Kota Gorontalo ikut serta memperkuat komitmen pelaksanaan target SDGs dengan mendukung pemenuhan ketersediaan data terhadap indikator dari BPS dan goal menurut Perpres nomor 59 tahun 2017, posisi BPS sama dengan k/l lain yaitu instansi penyedia data sedangkan BPS secara umum ada tugas sebagai pembina statistik, jika peran itu dijalankan maka seharusnya kita ikut "mengawal" K/L lain ketika menyediakan indikator SDGs.

2. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan statistik. Strategi yang akan dilakukan BPS Kota Gorontalo adalah:

- a. memberikan peran yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS Kota Gorontalo dalam pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan statistik
 - b. memberikan akses yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS Kota Gorontalo dalam mengambil kesempatan melanjutkan ke sekolah/kuliah, kursus, dan pelatihan
 - c. memasukkan perspektif gender dalam survei yang dilakukan oleh BPS Kota Gorontalo
 - d. menghasilkan ukuran statistik terpilah jenis kelamin guna mendukung evaluasi kebijakan berbasis gender di berbagai bidang pembangunan.
3. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

BPS Kota Gorontalo mendukung pengarusutamaan modal sosial budaya dan berupaya untuk mengakomodir kebutuhan data terkait kebudayaan dengan pendekatan rumah tangga. Salah satunya melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

Pengumpulan data terkait kebudayaan tersebut berpedoman pada *Framework for Cultural Statistics* (FCS) yang sudah dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 2009 dan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu juga untuk mewujudkan agenda *Sustainable Development Goals SDGs* (Goals 11.4) yakni mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia, Susenas MSBP Tahun 2018 menghasilkan berbagai macam indikator yang mampu menggambarkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan yang tumbuh dan berkembang, baik tangible (benda) maupun intangible (tak benda) yang menjadi bagian dari Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Beberapa di antaranya, yaitu: penggunaan bahasa daerah, upacara adat, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, seni budaya, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Selain itu, pengukuran kebudayaan tersebut juga mampu menggambarkan beberapa dimensi yang menjadi pilar pembangunan kebudayaan pada Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang dikembangkan oleh Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud. IPK merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kebudayaan.

4. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke

depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*.

Dalam rangka mengoptimalkan peranan teknologi digital kedalam semua area kegiatan statistik untuk meningkatkan nilai (*value*) yang dirasakan oleh pengguna data statistik baik yang dihasilkan BPS maupun instansi pemerintah lainnya dalam kerangka Sistem Statistik Nasional. Tranformasi digital berdampak perubahan pada domain kegiatan statistik, bisnis proses kegiatan statistik, dan pengalaman pengguna data statistik. Transformasi digital memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, analisis dan diseminasi data dan/atau informasi statistik secara cepat dan cerdas untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan imparisial dalam mendukung pertumbuhan Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari (i) aspek pemantapan ekosistem digital, mencakup sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, sistem layanan aplikasi, dan data digital, (ii) aspek pemanfaatan beragam teknologi komputasi dalam kegiatan statistik, seperti *big data*, *mobile computing*, *artificial intelligence*, dan *Internet of Things*, serta (iii) aspek pengelolaan teknologi informasi, yang mencakup kegiatan tata kelola dan tata laksana teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital.

3.2.5. Arah Kebijakan dan Strategi BPS dalam Menghadapi Covid19

Corona Virus Disesase 2019 atau disingkat COVID19 merupakan virus yang menyebabkan pneumonia atau sesak napas akut. Pada Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global dan darurat kesehatan global. Maka presiden menetapkan Kepres

12/2020 tanggal 13 April 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. ditindaklanjuti dengan pemerintah menerbitkan Keppres 7/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, yang diperbarui dengan Keppres 9/2020 tanggal 20 Maret 2020 Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Inpres 4/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran KL, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Peristiwa ini berdampak bagi sendi-sendi kehidupan baik sosial maupun ekonomi yang menyebabkan perlu dilakukan suatu tindakan perubahan pola bekerja, belajar dan beribadah serta penerapan *social distancing* dan *physical distancing* untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Kebijakan pemerintah dalam hal mendukung perekonomian agar terus berjalan stabil dan menjaga keselamatan rakyat, maka langkah pemerintah adalah merealokasi belanja Kementerian/Lembaga untuk pengadaan sarana dan prasarana medis, pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19 dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak berupa jaminan keselamatan sosial dengan melakukan *refocusing* anggaran berdasarkan Perpres 54/2020 tanggal 3 April 2020 tentang perubahan postur APBN TA 2020 dan ditindaklanjuti dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S- 302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja KL TA 2020 serta Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE 6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran KL dalam rangka percepatan penanganan Covid-19,

sehingga anggaran BPS Kota Gorontalo direalokasi sebesar 4,24 Miliar atau sebesar 43,43 persen.

Dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut, BPS Kota Gorontalo menerapkan kebijakan perubahan proses bisnis pengumpulan data di seluruh kegiatan statistik (survei dan sensus) dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip kegiatan statistik yang benar. Langkah BPS di antaranya:

1. Di tahun 2020 BPS tetap melaksanakan SP2020 dengan memperpanjang sensus penduduk 2020 online sampai dengan 31 Mei 2020. Membatalkan metode wawancara yang dilakukan petugas diganti oleh ketua RT pada wilayah masing-masing.
2. Kegiatan pendataan lapangan survei lainnya dilakukan melalui sistem wawancara jarak jauh melalui telepon.
3. Survei KSA tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan petugas di lapangan.
4. Menjalankan kegiatan perkantoran secara virtual, mulai dari aplikasi kolaborasi, email, chat, hingga rapat tatap muka secara *online*.
5. Kegiatan pendidikan dan pelatihan juga dilakukan secara *online*.

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, serta kewenangannya yang mendukung proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Pusat Statistik selama jangka waktu tahun 2020–2024, diperlukan kerangka regulasi yang mengikat tidak hanya ke dalam internal kelembagaan BPS, namun juga yang bersifat mengukuhkan posisi BPS dalam Sistem Statistik Nasional. Kerangka regulasi yang disusun dalam Renstra BPS Tahun 2020–2024 dimaksudkan untuk ditetapkan pada Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2020–2024, yang meliputi:

Tabel 4. Kerangka Regulasi

Jenis Regulasi	Rancangan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan
Rancangan Undang-Undang (RUU)	1. RUU tentang Sistem Statistik Nasional sebagai Pengganti atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional	Menekankan penguatan keterkaitan (<i>engagement</i>) antar K/L terhadap SSN melalui SNPSI yang tertuang pada poin 4.4 dan 4.5 Lampiran 1 Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000, yang menyebutkan bahwa penyelenggara kegiatan statistik perlu melakukan koordinasi dan kerja sama, dimana BPS berlaku sebagai inisiator
	2. RUU tentang Fungsi BPS sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi dan Kegiatan Statistik	Menguatkan Posisi BPS sebagai instansi pembina jabatan fungsional statistisi seperti yang tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Bersama Kepala BPS dan Kepala BKN Nomor 27 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keputusan Pelaksanaan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya, sebagai lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikasi atas profesi dan pelaksanaan kegiatan statistisi
	3. Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik	Melakukan perubahan terhadap Bab II tentang Organisasi Bagian Kesatu tentang Susunan Organisasi agar disesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis di BPS, sehingga lebih efektif

3.3. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan terkait fungsi dan organisasi yang diperlukan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS Kota Gorontalo tahun 2020–2024, harus didukung dengan tata laksana (proses bisnis) dan sumber daya manusia yang secara kualitas dan kuantitas mampu menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS secara efektif dan efisien. Mengingat vitalnya peran BPS dalam proses penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia, maka perlu dilakukan penguatan posisi BPS, baik secara internal maupun eksternal BPS.

Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan SDM, BPS Kota Gorontalo mendasarkan pada Program STATCAP CERDAS yang dihasilkan Bagian Transformasi Statistik, Biro Bina Program, BPS RI. Dalam Program Transformasi BPS yang tertuang melalui STATCAP CERDAS, BPS Kota Gorontalo ditargetkan akan menjadi salah satu kantor statistik yang menerapkan prinsip modernisasi melalui perubahan proses bisnis yang ada di BPS, yang semula silo (terpisah-pisah) menjadi lebih terintegrasi dengan didukung peningkatan dalam bidang teknologi informasi dan pembangunan SDM serta organisasi. Untuk mencapai perwujudan transformasi BPS tersebut dalam kurun waktu tahun 2020– 2024, pada dasarnya akan mengacu pada beberapa hal berikut:

3.4.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPS (Kondisi Saat Ini)

Mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, disebutkan bahwa BPS merupakan penyelenggara statistik dasar. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Pasal 58 disebutkan bahwa BPS bertugas untuk melakukan pembinaan statistik. Sedangkan terkait dengan Sistem Statistik Nasional, fungsi BPS ditegaskan kembali dalam

Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional, dimana BPS bertindak selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi.

Terkait struktur organisasi BPS sendiri diatur dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS, di mana menurut Pasal 2, BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi BPS sesuai Pasal 3 adalah sebagai berikut :

1. Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik;
2. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
3. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
4. Penetapan sistem statistik nasional;
5. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.

Tugas dan fungsi tersebut saat ini diselenggarakan oleh Kepala BPS Kota Gorontalo, Kasubbag Umum, Kepala Fungsi Sosial, Kepala Fungsi Produksi, Kepala Fungsi Distribusi, Kepala Fungsi Neraca wilayah dan Analisa Statistik, Kepala Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik.

BPS akan terus mengevaluasi kelembagaan, dengan mempertimbangkan berbagai macam unsur, dari sisi beban tugas yang semakin berat, sehingga

dibutuhkan organisasi yang lincah yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan, tentunya untuk mendukung BPS sebagai *world class* NSO.

Untuk yang akan datang struktur kelembagaan BPS akan dibentuk menjadi organisasi yang efektif dan efisien serta mampu mewujudkan BPS sebagai *strategic enabler* dan *decision support system* (DSS).

3.4.2. Capaian Program Transformasi BPS Hingga Semester II Tahun 2018

Program transformasi yang sedang dilaksanakan BPS bertujuan untuk mewujudkan cita-cita BPS sebagai salah satu kantor statistik yang modern dan berkelas dunia. Keinginan tersebut diwujudkan dengan memperbaiki proses bisnis statistik yang saat ini digunakan dengan didukung oleh perbaikan pada sisi teknologi informasi, sumber daya manusia, dan penyelarasan organisasi.

Sampai akhir tahun 2018, implementasi program transformasi BPS tersebut telah mencapai tahun keempat sejak dimulai pada pertengahan tahun 2014, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi BPS dalam menghasilkan dan mendiseminasikan data statistik yang berkualitas, reliabel dan tepat waktu sesuai dengan standar internasional dan *best practices*, serta responsif dalam memenuhi kebutuhan pengguna data. Sedangkan sasaran yang akan diwujudkan BPS, yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas statistik;
2. Terwujudnya peningkatan kapasitas TIK;
3. Terwujudnya pembangunan manajemen dan kapasitas SDM; dan
4. Terwujudnya pengelolaan kelembagaan dan penyelarasan organisasi.

3.4.3. Roadmap Transformasi BPS Tahun 2018–2021

Roadmap untuk setiap pilar transformasi dari tahun 2018–2021, yaitu:

Gambar 7. Roadmap Transformasi Statistik Tahun 2018-2021



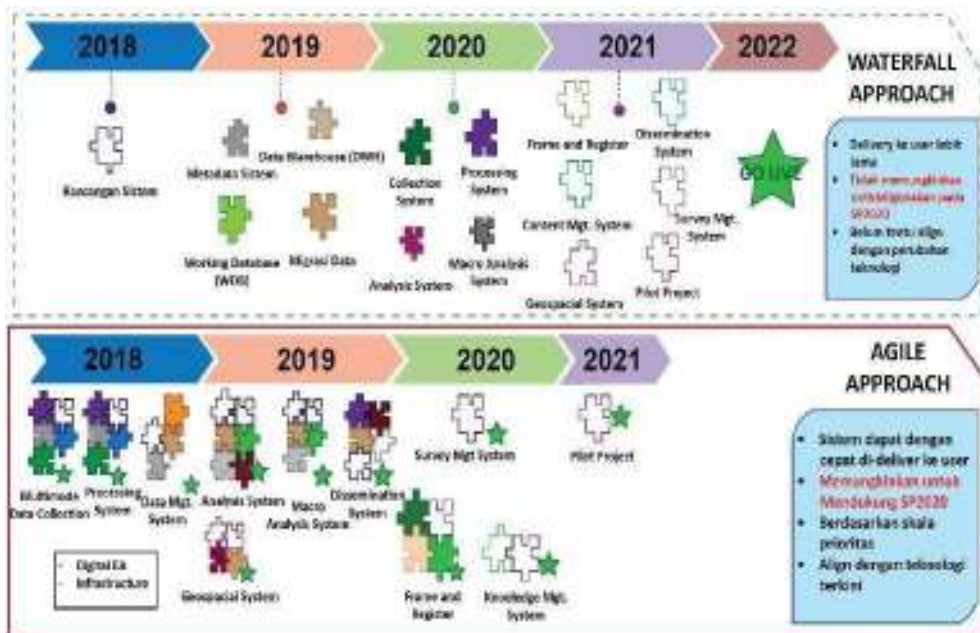
1. Pilar Transformasi Statistik

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa mulai tahun 2018 sampai 2021, fokus dari kegiatan transformasi statistik adalah melanjutkan proses reengineering proses bisnis untuk kegiatan-kegiatan statistik yang ada di BPS, baik yang berbasis usaha, rumah tangga dan data administrasi. Kegiatan tersebut secara paralel diikuti dengan penyusunan SOP untuk masing-masing kegiatan statistik tersebut. Selain itu, kegiatan pada transformasi statistik juga akan mencakup uji coba *continuous surveying*, baik untuk survei berbasis usaha maupun rumah tangga. Secara umum, kegiatan di transformasi statistik akan didukung kegiatan change management dengan adanya change champion workshop dan pembinaan change agent network

sebagai media untuk penyampaian informasi terkait progress dari program transformasi BPS.

2. Pilar Transformasi Teknologi dan Informasi

Gambar 8. Roadmap Transformasi TI Tahun 2018-2021



Pendekatan untuk implementasi transformasi TIK mengalami pergeseran dari yang semula bersifat waterfall menjadi agile. Pergeseran tersebut dilakukan dengan pertimbangan agar beberapa sistem yang dibangun sebagai hasil transformasi TI dapat segera “dinikmati” oleh stakeholder/ user terutama dapat digunakan untuk mendukung salah satu kegiatan besar BPS, yaitu Sensus Penduduk 2020. Selain itu, perubahan pendekatan juga dilakukan dengan tujuan agar transformasi yang sedang dijalankan selaras dengan perubahan teknologi yang terkini.

3. Pilar Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Gambar 9. Roadmap Transformasi SDM dan Organisasi Tahun 2018-2021



Pada tahun 2018, transformasi SDM dan Organisasi lebih difokuskan pada kegiatan yang terkait dengan performance dan career management. Sementara itu, pada tahun 2019 fokus kegiatan berkaitan dengan *assessment* dan pengembangan SIMPEG. Sedangkan, pada tahun 2020 dan 2021 kegiatan akan difokuskan pada hal-hal yang bersifat sosialisasi dan finetuning dari output yang telah dihasilkan pada tahun-tahun sebelumnya. Finetuning yang akan dilakukan dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan finetuning HRMIS dan regulasi serta peraturan.

Jika mengacu pada *roadmap* dari masing-masing pilar dalam program STATCAP CERDAS seperti yang diuraikan di atas, maka diharapkan Kerangka Kelembagaan BPS untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS tahun 2020–2024, secara garis besar dapat dicapai pada tahun 2021.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja BPS Kota Gorontalo

4.2. Kerangka Pendanaan BPS
Kota Gorontalo

BAB IV**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN****4.1. Target Kinerja BPS Kota Gorontalo**

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024 bahwa target kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS Kota Gorontalo 2020 – 2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPS untuk tahun 2020 – 2024, BPS menetapkan 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang mencerminkan hasil (outcome) dari program BPS. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program sebagai berikut:

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Tabel 5. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
BPS Kota Gorontalo Tahun 2020 - 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan							
	Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan (%)	34*	86,87*	92,5	93	93,2	Fungsi (IPDS); Fungsi Statistik Distribusi; Fungsi Statistik Sosial; Fungsi Statistik Produksi; dan Fungsi Nerwilis.
		Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)			100	100	100	
2.	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)			33,33	50	66,67	Fungsi IPDS
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)			50	66,67	83,33	Fungsi IPDS
3.	Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik			100	100	100	Fungsi IPDS; Fungsi Statistik Distribusi; Fungsi Statistik Sosial; Fungsi Statistik Produksi;

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
								Fungsi Nerwilis.
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi							
	SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	65	68	69,30	70	71	Sub Bagian Umum
		Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	90	92	95	96	98	Sub Bagian Umum

*) Target pada tahun 2022-2024 berubah karena berubahnya metode perhitungan target kinerja indikator

Sementara itu, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, BPS Kota Gorontalo memiliki sasaran program berikut dengan indikatornya sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program (*Outcome*):

Meningkatnya Pengelolaan SDM BPS dalam kerangka tata Kelola kelembagaan

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- a. Indeks Pengelolaan SDM

Sasaran Program (*Outcome*):

Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- a. Indeks penilaian SAKIP oleh Kemenpan RB;
- b. Hasil penilaian RB oleh Kemenpan RB;
- c. Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS;

- d. Persentase rekomendasi hasil revidi Inspektorat utama terhadap laporan keuangan BPS yang ditindaklanjuti;
- e. Persentase terselesaikannya produk hukum

Sasaran Program (*Outcome*):

Meningkatnya Pelayanan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai *Standard*

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- a. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)
- b. Persentase pembangunan *smart office*

2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Sasaran Program (*Outcome*):

Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a. Persentase, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional;
- b. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.

Sasaran Program (*Outcome*):

Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a. Presentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik;
- b. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar.

Sasaran Program (*Outcome*):

Penguatan statistik sektoral K/L/D/I

Dengan Indikator Kinerja Program

- a. Presentase K/L/D/I yang menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri.

4.2. Kerangka Pendanaan BPS Kota Gorontalo

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis BPS. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan BPS adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPS Kota Gorontalo Tahun 2020 - 2024

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
BPS Kota Gorontalo	6.718,65	5.465,23	5.675,05	7.221,22	12.903,57
054.01.01 Program Dukungan Manajemen	3.695,68	3.913,05	4.665,01	6.229,71	11.807,63
KEGIATAN 2886: BPS Provinsi/Kabupaten/Kota (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)	3.695,68	3.913,05	4.665,01	6.229,71	11.807,63
054.01.06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	3.022,97	1.552,19	1.010,04	991,51	1.095,94
KEGIATAN 2897:	32,51	34,02	35,22	36,45	37,72

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Direktorat Diseminasi Statistik (Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Statistik)					
KEGIATAN 2898: Direktorat Neraca Pengeluaran (Penyediaan dan Pengembangan Neraca Pengeluaran)	26,36	28,07	30,32	32,62	34,95
KEGIATAN 2899: Direktorat Neraca Produksi (Penyediaan dan Pengembangan Neraca Produksi)	9,01	9,56	9,98	10,40	10,82
KEGIATAN 2900: Direktorat Metodologi Sensus dan Survei (Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei)	2,54	2,73	2,86	2,99	3,12
KEGIATAN 2902: Direktorat Statistik Distribusi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi)	15,18	18,37	18,88	19,42	19,96
KEGIATAN 2903: Direktorat Statistik Harga (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga)	105,12	108,80	112,61	116,55	97,46
KEGIATAN 2904: Direktorat Statistik Industri (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan, dan Penggalan , Energi, dan Konstruksi)	62,34	71,80	77,75	83,73	89,73
KEGIATAN 2905: Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan)	2.389,33	824,37	227,92	248,70	280,92
KEGIATAN 2906: Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (Penyediaan dan Pengembangan Statistik	246,09	265,14	336,86	286,54	298,69

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Kesejahteraan Rakyat)					
KEGIATAN 2907: Direktorat Statistik Ketahanan Sosial (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial)	26,19	69,74	29,74	17,80	77,73
KEGIATAN 2908: Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata)	31,95	38,48	44,03	49,58	55,14
KEGIATAN 2909: Direktorat Statistik Peternakan Perikanan dan Kehutanan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik)	14,86	15,38	15,92	16,47	17,05
KEGIATAN 2910: Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Penyediaan dan Pengembangan)	61,49	65,72	67,97	70,27	72,63

Rincian target kinerja dan indikasi kebutuhan anggaran tiap program dan kegiatan tahun 2020-2024 tertuang dalam tabel target kinerja dan kerangka pendanaan sebagaimana tercantum dalam tabel.



BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Renstra BPS Kota Gorontalo periode 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Renstra BPS Republik Indonesia. Penyusunan Renstra tersebut mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020-2024 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS 2020 – 2024 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (*core business*) BPS, yakni:

1. Penyediaan data statistik berkualitas;
2. Pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan
3. Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional.

Tujuan strategis BPS yang juga menjadi tujuan BPS Kota Gorontalo sebagai perpanjangan tangan BPS di daerah untuk periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN;
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN; dan
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Renstra BPS Kota Gorontalo 2020-2024 merupakan pedoman untuk pencapaian visi, misi dan tujuan BPS dalam lima tahun ke depan, yang mencakup setiap tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja sasaran

strategis, arah kebijakan, serta strategi-strategi yang dijalankan. Untuk mencapai hal tersebut, perlu ditanamkan komitmen yang kuat bagi seluruh insan BPS dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada setiap insan BPS khususnya dalam melaksanakan amanah mulia ini. Amin.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan BPS Kota Gorontalo

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi Anggaran (000000 Rp)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kementerian/Lembaga: Badan Pusat Statistik								6.718,65	5.465,23	5.675,05	7.221,22	12.903,57
	SS 1. Meningkatkan pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten										
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan (%)		34*	86,87*	92,5	93	93,2					
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)				100	100	100					
	SS 2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten										
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)				33,33	50	66,67					
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)				50	66,67	83,33					

	SS 3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten										
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik)				100	100	100					
	SS 4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten										
	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP		65	68	69,30	70	71					
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)		90	92	95	96	98					
PROGRAM 01 : Program Dukungan Manajemen								3695,68	3913,05	4665,01	6229,71	11807,63
	Meningkatnya Pengelolaan SDM BPS dalam kerangka tatakelola kelembagaan	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten										
	Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (%)											
	Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu (%)		19	43	43	57	57					
	Progress Pengembangan jabatan fungsional baru (%)			25	50	75	100					

	Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja BPS	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten										
	Hasil penilaian SAKIP oleh Kemenpan RB		65	65	66	66	67					
	Hasil penilaian RB oleh Kemenpan RB		65	65	66	66	67					
	Meningkatnya Pelayanan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standard	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten										
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)		90	92	95	96	98					
	Jumlah satker yang menerapkan smart office		0	0	0	0	0					
	Dokumen grand design smart office		0	0	0	0	0					
KEGIATAN 2886 : (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugTeknis Lainnya BPS Provinsi)		Pusat/ Provinsi/ Kabupaten						3.695,68	3.913,05	4.665,01	6.229,71	11.807,63
Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS									343,68	925,50	2.311,85	7.702,79
	Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor = xx unit			3	5	3	3		73,71	131,50	82,85	86,99
	Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit			3	26	13	10		53,37	590,00	351,00	300,00
	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit			16	11	26	47		216,60	204,00	78,00	

	Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2										
	Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2				1200					1.800,00	7.315,80
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Aparatur BPS serta pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik							22,38	29,03	30,04	31,09	32,17
	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Yang Tepat Waktu	70	70	70	70	70					
Layanan Perkantoran							3.673,30	3.540,34	3.709,47	3.886,78	4.072,67
	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx (%)	100	100	100	100	100					
	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx (%)	100	100	100	100	100					
PROGRAM 06 : Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik							3022,97	1552,19	1010,04	991,51	1095,94
	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten									
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional (%)	34	35	37	37	40					
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional (%)	6	6	6	6	6					

	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten										
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)		16	50	50	66,67	83,33					
	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)				33,33	50	66,67					
	Persentase K/L/D/I yang menandatangani komitmen terkait Satu Data Indonesia (%)		11	14	18	21	29					
	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten										
	Persentase K/L/D/I yang menerima pembinaan statistik dan menerapkan hasil pembinaannya (%)			4	7	11	14					
KEGIATAN 2896: Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik (Pengembangan dan analisis statistik)		Pusat/ Provinsi/ Kab/Kota						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tersedianya data Analisis dan Pengembangan Statistik yang berkualitas											
	Jumlah Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang terbit tepat waktu		0	0	0	0	0					
	Jumlah model statistik sosial dan ekonomi		0	0	0	0	0					
	Jumlah Release data Analisis dan Pengembangan Statistik yang tepat waktu		0	0	0	0	0					

	Jumlah Indikator Kesetaraan Gender dan pemberdayaan Gender yang disusun	0	0	0	0	0					
	Jumlah Indikator/data yang terkait SDG yang terdapat pada publikasi	0	0	0	0	0					
	Jumlah Kajian penghitungan Indikator berbasis metode Small Area Estimation (SAE)	0	0	0	0	0					
	Jumlah Kajian Pemanfaatan Big Data untuk mendukung official statistics	0	0	0	0	0					
	Jumlah kegiatan statistik di Subject Matter yang telah melaksanakan kegiatan Penjaminan Statistik (PK) secara mandiri	0	0	0	0	0					
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I										
	Jumlah aktivitas pembinaan analisis dan pengembangan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;			90	93	95					
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance analisis dan pengembangan statistik	0	0	0	0	0					
KEGIATAN 2897: Direktorat Diseminasi Statistik (Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik)		Pusat/ Provinsi/ Kab/Kota					32,51	34,02	35,22	36,45	37,72
	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN						2,01	2,08	2,15	2,23	2,31
	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	6	6	6	6	6					

	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang masuk dalam Sirusa	3	3	4	4	5					
	Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	1	1	1	1	1					
	Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi	1	1	1	1	1					
	Jumlah sosialisasi petunjuk teknis penyusunan metadata ke K/L/D/I		1	1	2	2					
	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan						30,50	31,94	33,06	34,22	35,42
	Jumlah aktivitas layanan langsung terhadap konsumen	30	35	35	40	40					
	Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS (%)	89	90	91	93	95					
	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000					
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;		1	1	2	2					
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	0	0	0					
	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan	82	83	84	85	87					
	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas data	82	83	84	85	87					
KEGIATAN 2898: Direktorat Statistik Neraca Pengeluaran (Penyediaan		Pusat/ Provinsi/ Kab/Kota					26,36	28,07	30,32	32,62	34,95

dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran)											
	Tersedianya data Neraca Pengeluaran yang berkualitas						26,36	28,07	30,32	32,62	34,95
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00					
	Jumlah Release data Neraca Pengeluaran yang tepat waktu	0	0	0	0	0					
	Diskrepansi Statistik PDB/PDRB menurut pengeluaran	0	0	0	0	0					
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	100	100	100	100	100					
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100	100	100					
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	100	100	100					
	Persentase permintaan data PDB/PDRB menurut pengeluaran yang disetujui (%)	100	100	100	100	100					
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I										
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;			90	93	95					
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	0	0	0					

[illegible]

	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;			90	93	95						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	0	0	0						
KEGIATAN 2900: Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei)		Pusat/ Provinsi/ Kab/Kota						2,54	2,73	2,86	2,99	3,12
	Tersedianya dukungan Metodologi Sensus dan survei yang tepat guna							2,54	2,73	2,86	2,99	3,12
	Jumlah Dokumen desain sampling Sensus dan survei	0	0	0	0	0						
	Jumlah publikasi standarisasi dan klasifikasi statistik yang terbit tepat waktu	0	0	0	0	0						
	Jumlah Dokumen Pengembangan kerangka Sampel survei yang mutakhir	0	0	0	0	0						
	Persentase data SBR yang terupdate (%)	0	0	0	0	0						
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS (%)	100	100	100	100	100						
	Jumlah sistem aplikasi Pengembangan desain sensus dan survey yang dikembangkan dan dipelihara	0	0	0	0	0						
	Jumlah laporan peta desa yang mutakhir	1	1	1	1	1						
	Jumlah Peta desa dan blok sensus yang diupdate	50	50	50	50	50						

	Persentase subject matter yang melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan statistik dengan Dit. PMSS (%)	0	0	0	0	0					
	Jumlah pembinaan kegiatan statistik (baik dari aspek desain, KBLI, kerangka sampel, maupun pemetaan)	0	0	0	0	0					
	Jumlah publikasi/laporan MSA yang terbit tepat waktu	0	0	0	0	0					
KEGIATAN 2901: Direktorat Sistem Informasi Statistik (Pengembangan Sistem Informasi Statistik)		Pusat/ Provinsi/ Kab/Kota						0,00	0,00	0,00	0,00
	Terlaksananya integrasi dan pengolahan data dengan dukungan jaringan komunikasi yang handal										
	Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS pusat tepat waktu (%)	100	100	100	100	100					
	Persentase uptime layanan jaringan komunikasi (%)	0	0	0	0	0					
	Persentase pengembangan TIK BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir (%)	0	0	0	0	0					
	Persentase perbaikan sarana TI yang sesuai dengan service level agreement (%)	0	0	0	0	0					
	Jumlah penambahan koleksi data yang dihimpun	0	0	0	0	0					
	Jumlah pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	0	0	0	0	0					

	Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan (%)	0	0	0	0	0						
	Jumlah Dokumen Statcap Cerdas Bidang TI yang terbit tepat waktu	0	0	0	0	0						
	Indeks kepuasan layanan TI	0	0	0	0	0						
KEGIATAN 2902: Direktorat Statistik Distribusi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi)		Pusat/ Provinsi/ Kab/Kota						15,18	18,37	18,88	19,42	19,96
	Tersedianya Data Statistik Distribusi Yang Berkualitas							15,18	18,37	18,88	19,42	19,96
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu	5	5	5	5	5						
	Jumlah Release data Statistik Distribusi yang tepat waktu	0	0	0	0	0						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	0	0	0	0	0						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	100	100	100						
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I											
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0						

	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	0	0	0					
KEGIATAN 2903: Direktorat Statistik Harga (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga)											
	Pusat/ Provinsi/ Kab/Kota						105,12	108,80	112,61	116,55	97,46
	Tersedianya Data Statistik Harga Yang Berkualitas						105,12	108,80	112,61	116,55	97,46
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu	2	2	2	2	2					
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100	100	100					
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	100	100	100	100	100					
	Jumlah Release data Statistik Harga yang tepat waktu	0	0	0	0	0					
	Jumlah indikator/data yang memuat harga konstruksi setiap kabupaten/kota terhadap kota acuan yang terdapat dalam publikasi	0	0	0	0	0					
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I										
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;			90	93	95					
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	0	0	0					

KEGIATAN 2904: Direktorat Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi)	Pusat/ Provinsi/ Kab/Kota						62,34	71,80	77,75	83,73	89,73
	Tersedianya Data Statistik Industri Yang Berkualitas						62,34	71,80	77,75	83,73	89,73
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0					
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri yang terbit tepat waktu	6	6	6	6	6					
	Jumlah Release data Statistik Industri yang tepat waktu	0	0	0	0	0					
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100	100	100					
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I										
	Jumlah aktivitas pembinaan analisis dan pengembangan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;			90	93	95					
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance analisis dan pengembangan statistik	0	0	0	0	0					

KEGIATAN 2905 : Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan)		Pusat/ Provinsi/ Kab/Kota						2.389,33	824,37	227,92	248,70	280,92
	Tersedianya Data Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Yang Berkualitas							2.389,33	824,37	227,92	248,70	280,92
	Jumlah Aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0						
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu	5	3	3	3	3						
	Jumlah Release data Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang tepat waktu	0	0	0	0	0						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	97	97	97	97	97						
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	0	0	0						

KEGIATAN 2906 : Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat)		Pusat/ Provinsi/ Kab/Kota						246,09	265,14	336,86	286,54	298,69
	Tersedianya Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Yang Berkualitas							246,09	265,14	336,86	286,54	298,69
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi		0	0	0	0	0					
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu		2	2	2	2	2					
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)		96	96	96	97	97					
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;				90	93	95					
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik		0	0	0	0	0					
KEGIATAN 2907: Direktorat Statistik Ketahanan Sosial (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial)		Pusat/ Provinsi/ Kab/Kota						26,19	69,74	29,74	17,80	77,73
	Tersedianya Data Statistik Ketahanan Sosial Yang Berkualitas							26,19	69,74	29,74	17,80	77,73

	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0					
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu	2	2	2	2	2					
	Jumlah release Statistik Ketahanan Sosial yang tepat waktu	0	0	0	0	0					
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	0	0	0	0	0					
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	100	100	100					
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I						0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;			90	93	95					
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	0	0	0					
KEGIATAN 2908: Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata)		Pusat/ Provinsi/ Kab/Kota					31,95	38,48	44,03	49,58	55,14

	Tersedianya Data Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Yang Berkualitas						31,95	38,48	44,03	49,58	55,14
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0					
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang terbit tepat waktu	3	3	3	3	3					
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100	100	100					
	Jumlah Release data Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang tepat waktu	0	0	0	0	0					
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I										
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;			90	93	95					
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	0	0	0					
KEGIATAN 2909: Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan)		Pusat/ Provinsi/ Kab/Kota					14,86	15,38	15,92	16,47	17,05

	Tersedianya Data Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Yang Berkualitas						14,86	15,38	15,92	16,47	17,05
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0					
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik	2	2	2	2	2					
	Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu	0	0	0	0	0					
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100	100	100					
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	100	100	100					
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;			90	93	95					
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	0	0	0					
KEGIATAN 2910: Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)		Pusat/ Provinsi/ Kab/Kota					61,49	65,72	67,97	70,27	72,63

	Tersedianya Data Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Yang Berkualitas						61,49	65,72	67,97	70,27	72,63
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0					
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan yang terbit tepat waktu	4	4	4	4	4					
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	99	99	99	99	99					
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	99	99	99	99	99					
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	0	0	0	0	0					
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I										
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;			90	93	95					
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	0	0	0					

Lampiran 1: Matriks Kerangka Regulasi Renstra BPS

JENIS REGULASI	RANCANGAN KERANGKA REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTANSI	TARGET PENYELESAIAN
Rancangan Undang-Undang	1. Rancangan Undang-Undang tentang Statistik, sebagai penggantian atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	Perlunya pengaturan yang menjawab isu dan tantangan penyelenggaraan statistik nasional terkini yang diantaranya yaitu: a. <i>open data</i>, hubungan <i>open data</i> dan <i>official statistics</i>; b. pertukaran data di antara produsen <i>official statistics</i>; c. posisi BPS sebagai <i>national statistic office</i> dan keterkaitannya dengan manajemen data pemerintah; d. penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang terpadu dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi informasi (<i>Big Data</i>, <i>Artificial Intelligence</i>, dan lain-lain) f. integrasi data geospasial dan data statistik; g. kolaborasi penyelenggaraan statistik dengan Bank Sentral; dan h. akses dan kerahasiaan data statistik.	Biro Humas dan Hukum	BPS, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi terkait lainnya, serta DPR	Tahun 2025

JENIS REGULASI	RANCANGAN KERANGKA REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTANSI	TARGET PENYELESAIAN
Rancangan Peraturan Presiden	2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Statistik Nasional	Membangun penguatan keterkaitan (<i>engagement</i>) antar K/L terhadap SSN melalui SNPSI dalam penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan statistik. Pengaturan utama dalam SSN, diantaranya yaitu: a. SNPSI; b. kelembagaan statistik; c. jenis statistik; d. proses bisnis dan metodologi statistik; e. infrastruktur statistik nasional; f. pusat rujukan informasi statistik; g. pembinaan statistik.	Biro Humas dan Hukum	BPS, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPE NAS, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya	Tahun 2023
	3. Rancangan Peraturan Presiden tentang BPS, sebagai pengganti atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik	Perlunya penataan dan penguatan organisasi BPS dalam rangka mewujudkan SSN yang terpadu dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta merujuk pada proses bisnis kegiatan statistik internasional berdasarkan <i>Generic Statistical Business Process Model</i> (GSBPM), <i>Generic Activity Model for Statistical Organization</i> (GAMSO), dan <i>factory statistic</i> .	Biro Humas dan Hukum	BPS, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya	Tahun 2023

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA GORONTALO**

Jalan Dewi Sartika No. 21, Kota Tengah, Kota Gorontalo
Telp. (0435)-821956, Homepage: gorontalokota.bps.go.id
E-mail: bps7571@bps.go.id